

**PERAN BADAN KEPEGAWAIAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DALAM
PELAKSANAAN REKRUTMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL
(Studi Pada Kantor Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati)**

Muhammad Anis, Afifuddin, Roni Pindahanto

Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

LPPM Unisma Jl, MT Haryono Malang, 65144, Indonesia

E-mail: anismuhammadun@gmail.com

ABSTRAK

Manusia selalu menjadi titik sentral dalam suatu kehidupan di dunia, sebab manusia mempunyai ruang lingkup pergerakan yang sangat luas. Manusia sangat diakui dalam berperan dalam suatu organisasi, baik organisasi intra ataupun organisasi extra pemerintahan. Dimana yang dimaksud dengan manusia dalam organisasi dan instansi adalah pegawai, dalam hal ini yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pelaksanaan pemerintah, negara indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahnya sendiri dengan sistem otonomi daerah. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, pegawai negeri sipil di Indonesia terdiri dari negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Sebagai warga penduduk indonesia pasti menginginkan perkembangan negara menjadi baik, dalam artian rekrutmen pegawai negeri sipil harus benar benar di jalankan dengan baik sehingga para pegawai negeri sipil mempunyai bekal yang cukup dan pantas untuk dijadikan perkembangan majunya negara indonesia, Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mempunyai peran yang sangat penting di dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil sehingga Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus bisa memberikan fasilitas keterampilan, inovasi atau sarana prasarana dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik analisis menggunakan model analisi dan interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1994). Peran yang telah dilakukan oleh BKPP sangatlah penting untuk mensukseskan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil begitu juga peran penting dalam rekrutmen adalah kepanitiaan inti dalam acara tanpa panitia sangatlah mustahil, begitu juga panitia yang telah di bentuk termasuk orang orang yang terpilih yang mana mempunyai pengalaman pengalaman dan keterampilan yang bisa mensukseskan acara pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Berkaitan dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah memberikan informasi kepada masyarakat terkait pendaftaran CPNS di Kabupaten Pati.

Kata Kunci : Peranan, BKPP, Pelaksanaan, Rekrutmen PNS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia selalu menjadi titik sentral dalam suatu kehidupan di dunia, sebab manusia mempunyai ruang lingkup pergerakan yang sangat luas. Manusia sangat diakui dalam berperan dalam suatu organisasi, baik organisasi intra ataupun organisasi extra pemerintahan. Dimana yang dimaksud dengan manusia dalam organisasi dan instansi adalah pegawai, dalam hal ini yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai negeri sipil (PNS). Dalam pelaksanaan pemerintah, negara indonesia menganut asas desentralisasi yaitu dengan memberikan kesempatan dan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahnya sendiri dengan sistem otonomi daerah. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah, pegawai negeri sipil di Indonesia terdiri dari negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah profesi yang mengabdikan kepada masyarakat yang mana mempunyai ciri khas di antara ciri cirinya adalah tugas dan karakteristik pelayanan publik (public services). Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah suatu jenis kepegawaiaan Negeri di samping Anggota TNI dan Anggota Polri (UU No 43 TH 1999). Pengertian Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU 43/1999).

Masyarakat juga menginginkan pekerja yang mengabdikan kepada negara mempunyai kualitas dan kuantitas atas kinerjanya sehingga dari pihak penyelenggara mempunyai ketentuan ketentuan persyaratan yang bisa menjamin mutu atas kinerja pegawai negeri sipil (PNS) tersebut. Pegawai negeri sipil (PNS) di negara kita yang kinerjanya

kurang baik sehingga kurang majunya negara dan banyaknya kasus-kasus tertentu yang menimpa atas instansi-instansi yang di naungi oleh negara, penyebab kurang kedisiplinan atau pegawai negeri sipil (PNS) merugikan dan terpuruknya nama harum negara.

Diera globalisasi sekarang ini peran pegawai negeri sipil sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Oleh karena itu, perhatian kita perlu diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang berfungsi sebagai tenaga penggerak dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang sedang digalakkan.

Kebijakan pemerintah memberlakukan sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan PP No.98 Tahun 2000 tentang pengadaan CPNS menjadi PNS, selain memberikan dampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan dan harapan tenaga honorer serta pelamar umum dalam rangka penataan dan pengembangan PNS sebagai komponen sumber daya aparatur pemerintah, juga masih menyisakan sejumlah permasalahan yang tidak jarang menimbulkan dampak negatif baik langsung maupun tidak langsung terhadap dinamika penerimaan di sejumlah daerah.

Penetapan PP No.11 Tahun 2002 sebagai instrument yuridis atau legal dalam seluruh proses penyelenggaraan rekrutmen CPNS, memuat sejumlah ketentuan baik ketentuan umum, tujuan dan sasaran kebijaksanaan, kriteria atau mekanisme, persyaratan CPNS, maupun ketentuan mengenai tata cara penerimaan CPNS melalui seleksi administrasi dan lainnya.

Berdasarkan sejumlah ketentuan tersebut dan beberapa permasalahan yang timbul atau terjadi selama dalam proses penyelenggaraannya, menjadi sesuatu hal yang menarik untuk di kaji atau di analisis atau evaluasi dengan tetap berpedoman pada beberapa ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal PP No. 11 Tahun 2002 dan PP No. 43 Tahun 2007 tersebut.

Secara Obyektif dan Transparan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mempunyai persyaratan lain bagi pengangkatan, pengadaan seorang tenaga honorer dan pelamar menjadi CPNS adalah harus dilakukan secara Obyektif dan Transparan, berdasarkan PP No. 43 Tahun 2007, terutama pada pasal 7 yang berbunyi: pengangkatan tenaga honorer dilakukan secara obyektif dan transparan. Dan PP No. 98 Tahun 2000 terutama pada pasal 5 ayat 1 lowongan formasi Pegawai Negeri Sipil diumumkan seluas luasnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Proses penerimaan CPNS semua pihak sudah berusaha semaksimal mungkin dan bersikap Obyektif dan Transparan, meskipun demikian tetap diakuinya adanya keluhan-keluhan dari pihak

peserta dan pihak pelaksana atas tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang hendak memaksakan keinginannya agar keluarga mereka yang di dahulukan sama juga bagi pelamar umum agar anak dan keluarga yang diluluskan.

Tanggapan sejumlah tenaga honorer atau pelamar umum mengungkapkan bahwa sangat sulit mengharapkan proses penerimaan CPNS yang Obyektif dan Transparan karena masih adanya intervensi ataupun tekanan-tekanan tentu terhadap pihak penyelenggara dan panitia pelaksana. Semua sudah menjadi rahasia umum ataupun menjadi pemandangan umum dalam setiap penyelenggaraan rekrutmen CPNS.

Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan rekrutmen CPNS. Salah satu peraturan perundang-undangan yang tergolong relative baru adalah peraturan pemerintah PP No. 48 Tahun 2005 yang diubah menjadi PP No. 43 Tahun 2007 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. PP ini merupakan tindak lanjut dari PP No. 97 Tahun 2000 tentang formasi Pegawai Negeri Sipil, kemudian PP No. 11 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Analisis tentang pelaksanaan rekrutmen CPNS yang dihadapi oleh pihak penyelenggara/panitia pelaksana dan pengawas dari BKPP difokuskan pada 4 aspek berikut:

1. Motivasi
2. Peran kelembagaan
3. Tekanan/intervensi
4. Pengawasan

Keempat aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan narasumber dari pertanyaan yang diajukan.

Peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terasa belum sepenuhnya optimal dan selektif dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS, pada beberapa aspek dinilai sudah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam PP No. 48 Tahun 2005 yang telah di revisi menjadi PP No. 43 Tahun 2007, namun dalam beberapa aspek lainnya kurang sesuai termasuk masih adanya tenaga honorer dengan bidang keahlian dan kriteria usia serta masa kerja tertentu yang tidak mendapat prioritas dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS tahun 2005-2010, namun dalam beberapa aspek lainnya dinilai kurang sesuai adalah kriteria pelaksana, seleksi administrasi dan penggunaan seluruh rekrutmen. Sedangkan aspek yang dinilai sesuai adalah beberapa pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS yang tertuang dalam pasal 1 dan pasal 3, yang mana pasal tersebut cenderung menimbulkan polemik serta masih terjadinya pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNS meskipun ada larangan dalam PP No. 8 Tahun 2005.

Secara keseluruhan, ada 4 faktor yang berperan dalam pelaksanaan rekrutmen CPNS dalam menunjukkan kelancaran pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2005 PP No. 43 Tahun 2007 yaitu motivasi, tekanan/intervensi, peran kelembagaan, dan pengawas. Namun faktor yang dominan adalah motivasi, di samping tekan dan peran kelembagaan.

Sebagai warga penduduk Indonesia pasti menginginkan perkembangan negara menjadi baik, dalam artian rekrutmen pegawai negeri sipil harus benar-benar di jalankan dengan baik sehingga para pegawai negeri sipil mempunyai bekal yang cukup dan pantas untuk dijadikan perkembangan majunya negara Indonesia, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mempunyai peran yang sangat penting di dalam rekrutmen calon Pegawai Negeri Sipil sehingga Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) harus bisa memberikan fasilitas keterampilan, inovasi atau sarana prasarana dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut.

Berawal dari permasalahan dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) peneliti ingin mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang terjadi dalam proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta bagaimana Peran Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu penulis memilih judul "**Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Melaksanakan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil**".

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif. Satori dan Komariah (2005:29) penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu yang mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.

Menurut Azwar (2013:6) "Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan".

Menurut Bungin (2009:36) penelitian kualitatif dengan formal deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas, berbagai kondisi, berbagai

situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat untuk menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. Kemudian mengangkat permukaan atau gambaran tentang kondisi situasi antara variabel tersebut.

Dipilih jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif bertujuan agar mendapatkan gambaran secara jelas dan nyata gejala dilapangan secara menyeluruh kemudian mengungkapkan secara deskriptif tentang Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Fokus Penelitian

Menurut Meleong (2008:4) Penetapan fokus penelitian dalam pendekatan kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu: penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria memasukkan atau mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dengan meneliti Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di kota Pati.

1. Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, dengan sub fokus:
 - a. Optimalisasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Peranan instansi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten pati.
 - c. Pencegahan ketidak stabilan dalam Rekrutmen.
2. Faktor-Faktor penghambat dan penunjang dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil, dengan sub fokus:
 - a. Faktor pendukung dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Subyek dan Latar Penelitian

Menurut Arikunto (2006:118) berpendapat bahwa objek penelitian adalah apa yang menjadi perhatian suatu penelitian. Objek penelitian ini adalah Peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Latar penelitian merupakan tempat atau wilayah di mana peneliti akan di lakukan, Peneliti memilih lokasi di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

Sumber Data

Menurut (Sutopo, 2002:72) Data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang berhasil di

kumpulkan peneliti daei dunia yang di pelajarinya. Data dalam penelitian ini adalah data yang berwujud informasi mengenai Peranan Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Sumber data dalam subjek di mana data di peroleh (Arikunto, 2006: 192). Sumber data penelitian ini yaitu Ketua, Badan Kepegawaiaan pendidikan dan pelatihan Kabupaten Pati. Penelitian ini digunakan dengan metode deskriptif kualitatif dan untuk memperoleh data penelitian menggunakan cara:

1. Sumber Data Primer

Mencari data primer dapat dilakukan dengan wawancara mendalam untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini menjadi lengkap. Dalam hal ini data primer akanb diperoleh dari Ketua Badan Kepegawaiaan daerah dan instansi pegawai Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung melauai media perantara atau data yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain yang telah disusun dan dipublikasikan dan data tersebut dapat diperoleh melauai tulisan, tabel, gambar, dokumen, dan simbol-simbol lain.

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan peneliti. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu :

a) Wawancara (*Interview*)

Menurut Sutopo (2002: 59) wawancara mendalam bisa dilakatakan pernyataan dan jawabannya disertakan atau berada pada orang yang diwawancarai. Sifat dari wawancara mendalam adalah open ended dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan subyek yang diteliti tentang banyak hal yang dapat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggali informasinya secara mendalam.

b) Pengamatan (*Observasi*)

Responden mengemukakan informasinya secara lisan dalam hubungan tatap muka, maka responden tidak perlu menuliskan jawabanya, karena memakai teknik rekam (Faisal, 1982: 213). Teknik wawancara mendalam dipergunakan untuk mengetahui tanggapan Ketua Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan, Pengurus Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan, Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil. Menurut Nurgiyantoro (2001: 56) pewawancara tidak sekedar mengajukan pertanyaan dan mendengarkan isi jawabanya melainkan juga mengamati tingkah laku sikap.

c) Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen, data atau arsip yang berkaitan dengan masalah yang teliti. Data diperoleh dari instansi, kantor atau tempat ditetapkan menjadi lokasi penelitian.

Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara penelitian yang digunakan untuk menguji dan menarik kesimpulan. Analisis data merupakan bagian yang amat penting karena dengan analisis data inilah data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga berhasil dalam menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang diajukan dalam penelitian. Analisis data adalah proses pengaturan urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Miles dan Huberman (1992:15-20) memaparkan prosedur analisis data sebagai berikut :

1. Reduksi Data. Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan
2. Penyajian Data. Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik penyajian data dalam bentuk table maupun naratif yang menggabungkan informasi yang tersusun kedalam bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan dan bagian bagian tertentu dari penelitian.
3. Menarik Kesimpulan. Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dari proposisi peneliti menurut data yang diperoleh dilapangan.

PEMBAHASAN

Peranan Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil

Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) mempunyai proses awal dalam persiapan Rekrutmen PNS yang perlu disiapkan sejak awal adalah dasar pelaksanaan acara yang di selenggarakan suatu instansi adalah informasi yang mana setiap informasi mempunyai manfaat yang sangat penting, masyarakat tidak akan ada yang tau jika ada pendaftaran Rekrutmen PNS tanpa informasi untuk di zaman moderen seperti sat ini MENPAN mempunyai aplikasi yang bernama E-informasi yang mana mempermudah masyrakat calon PNS yang ingin mendaftar. Setelah mendapatkan utusan dari MENPAN lembaga membuat SK kegiatan. Begitu juga formasi dalam suatu acara atau susunan kepanitiaan yang perlu kita

siapkan untuk mensukseskan suatu acara tersebut. BKPP menyiapkan fasilitas dalam pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) begitu juga BKPP memferifikasi berkas berkas yang telah disiapkan oleh pendaftar untuk di seleksi persyaratannya yang mana seleksi tersebut adalah seleksi administrasi ketika pendaftar telah lolos dalam seleksi tahapan pertama yaitu seleksi administrasi maka akan melanjutkan seleksi selanjutnya yang mana seleksi tersebut adalah seleksi kompetensi dasar atau (SKD) dan seleksdi selanjutnya adalah seleksi kompetensi bidang (SKB) setelah ketiga seleksi ini selesai maka jumlah nilai di gabung dan pendaftar mendapatkan tempat bertugas.

Bagaimana peranan Badan Kepegawaian Daerah dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil? Peran BKPP sangatlah penting untuk mensukseskan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil begitu juga peran penting dalam rekrutmen adalah kepanitiaan inti dalam acara tanpa panitia sangatlah mustahil, begitu juga panitia yang telah di bentuk termasuk orang orang yang terpilih yang mana mempunyai pengalaman pengalaman dan keterampilan yang bisa mensukseskan acara pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Apa saja faktor penghambat dan penunjang dalam pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil?

Penghambat dalam pelaksanaan rekrutmen diantaranya adalah jadwal yang tidak jelas, lalu anggaran kenapa anggaran menjadi faktor penghambat? Yang pertama BKPP telah mencoba menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan rekrutmen dalam kendalanya adalah perubahan anggaran dari pusat.

Penunjang dalam pelaksanaan rekrutmen PNS adalah anggaran dalam pelaksanaan acara yang mana dalam pelaksanaan tersebut perlu untuk disiapkan dan didukung dalam kesuksesan acara, jumlah pendaftar atau SDM yang antusias dalam pelaksanaan rekrutmen tersebut yang mana sudah memenuhi persentase dalam pendaftaran yang akan dibuka.

Sebagian besar penduduk negara Indonesia menginginkan menjadi Pegawai Negeri Sipil karna ketentuan dalam gaji pegawai sudah jelas sehingga masyarakat berbondong bondong mendaftarkan dirinya sebagai peserta seleksi calon Pegawai Negeri Sipil seleksi tersebut mempunyai banyak tahapan dan proses dalam mekanisme pendaftarannya yang mana calon peserta wajib dalam melengkapi berkas berkasnya agar dapat lolos dalam tahap pendaftaran sehingga dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, dari sinilah manfaat Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dalam Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil yang bisa menjembatani masyarakat dalam info pendaftaran dan info penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil sehingga masyarakat lebih fokus dalam bertanya mengenai rekrutmen Pegawai Negeri Sipil.

Kesimpulan

Pelaksanaan rekrutmen pegawai negeri sipil yang mana diselenggarakan oleh Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati pada tahun 2018 berjalan dengan lancar begitu juga dalam pelaksanaan tidak terdapat kecurangan di dalamnya sehingga peserta yang mendaftar merasakan kepuasan dalam mengikuti pelaksanaan seleksi CPNS tersebut, Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai peran sangat penting dalam penyelenggaraan rekrutmen tersebut, dalam tahun 2018 peserta yang antusias mengikuti rekrutmen CPNS berjumlah 7.999 peserta. seleksi CPNS terdapat 3 tahapan yang mana harus di selesaikan setiap peserta dan setiap tahapan mempunyai kuota masing-masing dan kuota tersebut lebih cenderung sedikit di dalam tahapan tersebut, sehingga peserta harus lebih semangat dalam mempelajari teori yang di sajikan dalam seleksi.

Informasi pendaftaran dapat dicari di E-informasi yang telah disiapkan oleh instansi sehingga calon peserta mudah mencari tau tentang apa saja yang perlu disiapkan dalam melengkapi persyaratan mengikuti seleksi CPNS. Seleksi yang pertama dalam CPNS adalah seleksi administrasi semua berkas di kumpulkan untuk di periksa kelengkapan persyaratannya dan selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Dasar atau bisa di sebut (SKD) dan seleksi tersebut telah di fasilitasi oleh BKN, seleksi yang selanjutnya adalah Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) setelah ketiga seleksi ini selesai maka jumlah nilai di gabung dan pendaftar mendapatkan tempat bertugas.

Saran

Dengan kesimpulan diatas maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bisa dilakukan oleh Kantor Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pati.

1. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait hal-hal yang baru dan bisa bermanfaat bagi masyarakat.
2. Bisa lebih teliti dalam menyeleksi peserta calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga pendaftar tidak mempunyai rasa curiga terhadap instansi.
3. Lebih serius dalam menangani orang-orang yang melakukan penelitian di Kantor Badan Kepegawaiaan Pendidikan dan Pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Syaifuddin. 2013. Metode Penelitian. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Kencana. Jakarta

- Deni Arisandi. 2011. "Pengertian Peran". www.Arisandi.com (diunduh 28 Oktober 2017)
- Fariz Siregar. 2011. "Pengertian Peran, Status, Nilai, Norma, dan Budaya/Kebudayaan". www.pengertian_peran,status,nilai,norma_dan_budaya_dalam_sosiologi (diunduh pada tanggal 28 Oktober 2017)
- Kamus Bahasa Indonesia. "Peran". www.kamus_bahasa_indonesia (diunduh pada tanggal 28 Oktober 2017)
- Lexy J. Moleong. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosakarya. Bandung.
- Milles, mettev B. Hubberman A. 1992. Analisis Data Kualitatif. UI Press. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2003. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.